

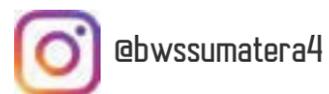
Profil

Balai Wilayah Sungai Sumatera IV

Tahun Anggaran 2020



Balai Wilayah Sungai Sumatera IV
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



<http://sda.pu.go.id/bwssumatera4>



Gambaran Umum BWS Sumatera IV

Tentang Balai Wilayah Sungai Sumatera IV

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Wilayah Sungai mempunyai melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Balai Wilayah Sungai Sumatera IV mengalami 6 (enam) kali penggantian pejabat Kepala Balai sejak pembentukannya pada tahun 2007. Penggantian tersebut karena memasuki masa pensiun atau mutasi ke tempat lain. Adapun pejabat Balai Wilayah Sungai Sumatera IV dari tahun 2007 sampai sekarang dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

No	Nama Kepala Balai	Periode
1	Ir. Tri Sasongko Widiyanto, Dipl. HE.	2007 - 2008
2	Muhyidin, ME.	2009 - 2010
3	Simon Lukum, SH. (Plt. Kepala Balai)	2010
4	Ir. Tris Raditian, MM.	2011 - 2013
5	Ir. Agus Rudyanto, M.Tech.	2013 - 2016
6	Hendra Ahyadi, ST., M.Sc.	2016 - 2017
7	Dr. Ismail Widadi, ST., M.Sc.	2017 - Sekarang

--- Tabel Daftar Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV ---

Adapun Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera IV pada tahun 2007 sampai dengan 2010 berlokasi di KK Water Front City New Town Shop House No. 102 Sei Temiang – Batam. Setelah selesai pembangunan gedung kantor yang baru pada tahun 2010, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV mulai menempati gedung kantor baru yang beralamat di Jl. R.E. Martadinata No.1 Sekupang – Batam.

Nama Balai : BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA IV
 Alamat : JL. R.E. Martadinata No. 1 Sekupang – Batam
 Telepon : 0778 - 321523
 Fax : 0778 - 321531
 Website : <http://sda.pu.go.id/bwssumatera4>
 Email : bws.sumatera4@pu.go.id
 Wilayah Sungai : WS Kepulauan Riau

Riwayat Singkat Balai Wilayah Sungai Sumatera IV



Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
2. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
4. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/ pengembangan sumber daya air;
5. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
6. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
7. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
8. Pengelolaan drainase utama perkotaan;
9. Pengelolaan sistem hidrologi;
10. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
11. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
13. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin penguasaan sumber daya air pada wilayah sungai; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
14. Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
15. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
16. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
17. Pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
19. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan
20. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

Visi dan Misi Pengelolaan Sumber Daya Air

VISI

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat

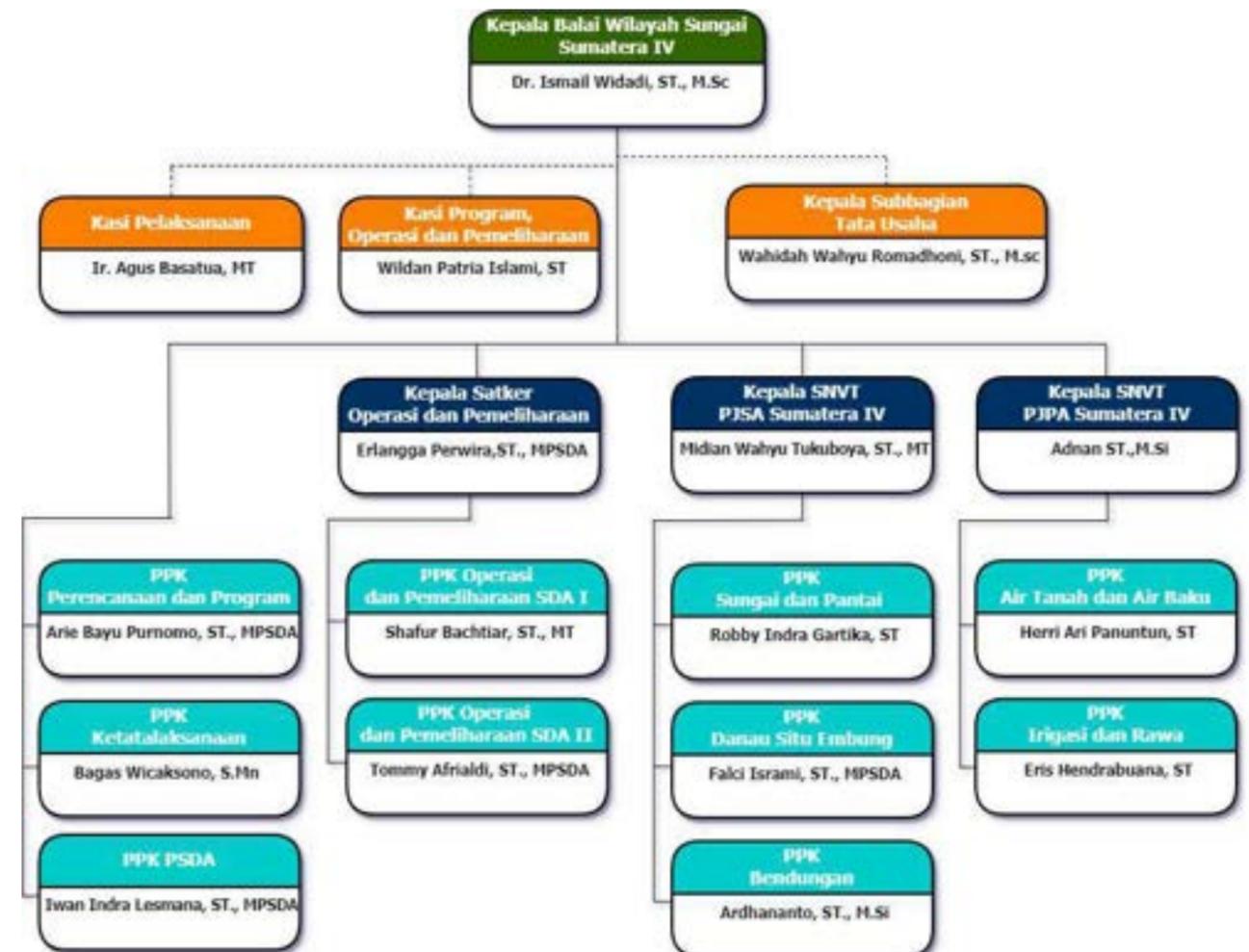
MISI

1. Mengkonservasi sumber daya air secara berkelanjutan;
2. Mendayagunakan sumber daya air secara adil serta memenuhi Persyaratan kualitas dan kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat;
3. Mengendalikan daya rusak air;
4. Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air;
5. Meningkatkan keterbukaan serta ketersediaan data dan informasi dalam pengelolaan sumber daya air.



Gedung Kantor BWS Sumatera IV

Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera IV



Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA), urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik., melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.

Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan

Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program, operasi dan pemeliharaan.

Seksi Pelaksanaan

Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku.

Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera IV

Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera IV terdiri atas Tiga unit kerja, yaitu Tatalaksana, Penatagunaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Perencanaan dan Program. Dalam Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap unit kerja mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, antara lain:

TATALAKSANA

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian Tatalaksana menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
- Pelaksanaan pengelolaan anggaran serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- Pelaksanaan Penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara;
- Pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- Penyusunan laporan berkala balai;
- Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara sebagai unit akuntansi wilayah;
- Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga balai.

PERENCANAAN DAN PROGRAM

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- Penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada WS;
- Penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran;
- Penyiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan bimbingan teknis dalam penyusunan program.
- Pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik.

PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA)

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Penatagunaan Sumber Daya Air (PSDA) menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan Pola dan Rencana PSDA WS;
- Pelaksanaan evaluasi kelayakan serta evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan PSDA WS;
- Penyiapan rekomtek dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan SDA pada wilayah sungai;
- Pengelolaan sistem Hidrologi dan peringatan dini;
- Fasilitasi kegiatan TKPSDA pada wilayah sungai;
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan PSDA;

Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA (OP SDA) Sumatera IV

Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pemeliharaan, penyediaan data dan informasi sumber daya air serta koordinasi pengelolaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya, Operasi dan Pemeliharaan SDA menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, Pengendalian dan pengawasan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- c. Pemantauan dan Pengevaluasian kelayakan OP pada sarana dan prasarana SDA;
- d. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan OP;
- e. Penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan OP;
- f. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- g. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan OP;



Kegiatan P3TGAI Tahun Anggaran 2019

SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sumatera IV

SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sumatera IV mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air. Dalam melaksanakan tugasnya, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan teknis sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
- b. Penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, embung, bendungan dan tampungan air lainnya termasuk pemantauan dan evaluasinya;
- c. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, embung, bendungan dan tampungan air lainnya termasuk pemantauan dan evaluasinya;
- d. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, embung, bendungan dan tampungan air lainnya termasuk pemantauan dan evaluasinya;
- e. Penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, embung, bendungan dan tampungan air lainnya yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, embung, bendungan dan tampungan air lainnya.



Bendungan Sei Gong, Kota Batam

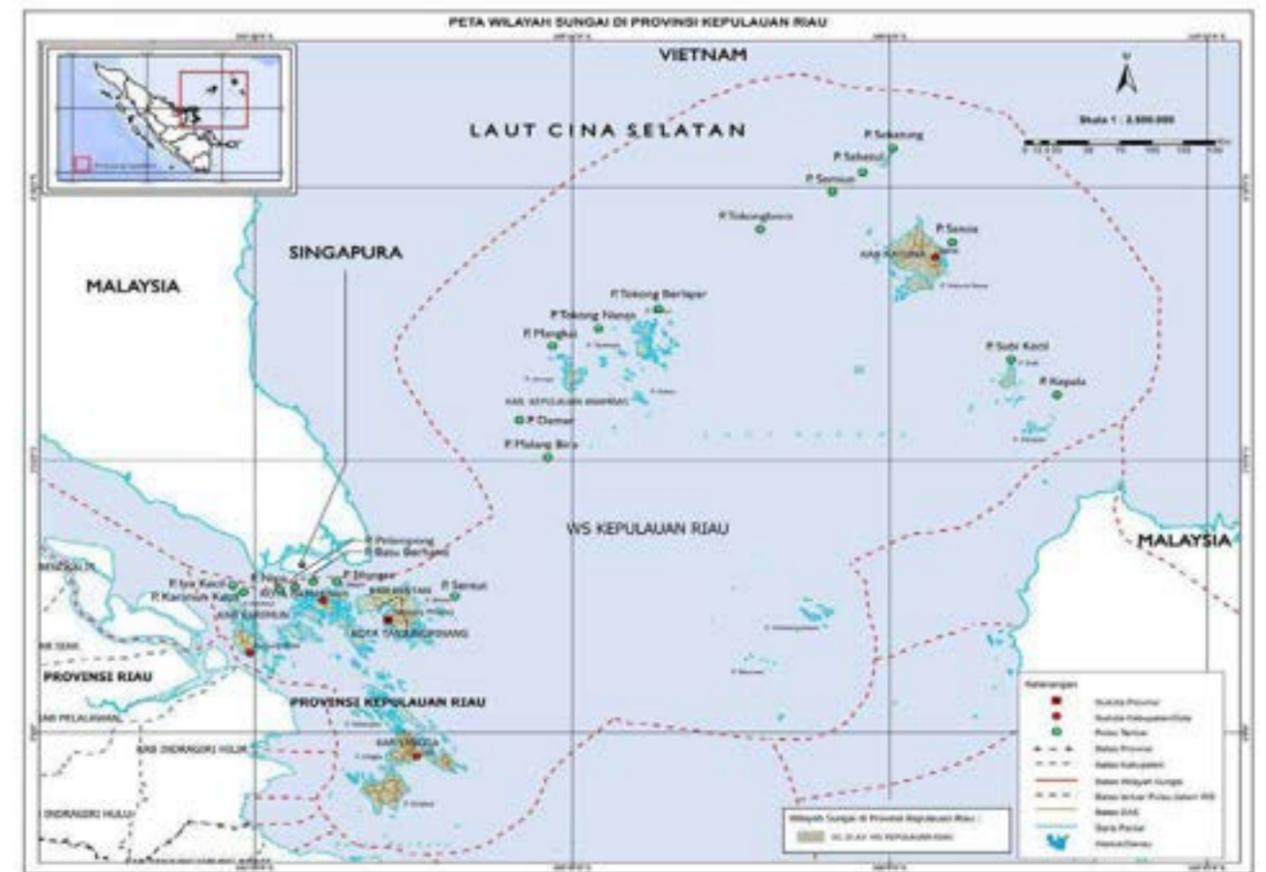
SNVT Pelaksanaan Jaringan dan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera IV

SNVT Pelaksanaan Jaringan dan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera IV mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan pemanfaatan air. Dalam melaksanakan tugasnya, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera IV menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan teknis irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah;
- b. Penyusunan rencana persiapan OP sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah;
- c. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah termasuk pemantauan dan evaluasinya;
- d. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah;
- e. Penyediaan bimbingan teknis, dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah.



Embung DAS Kawal, Kabupaten Bintan



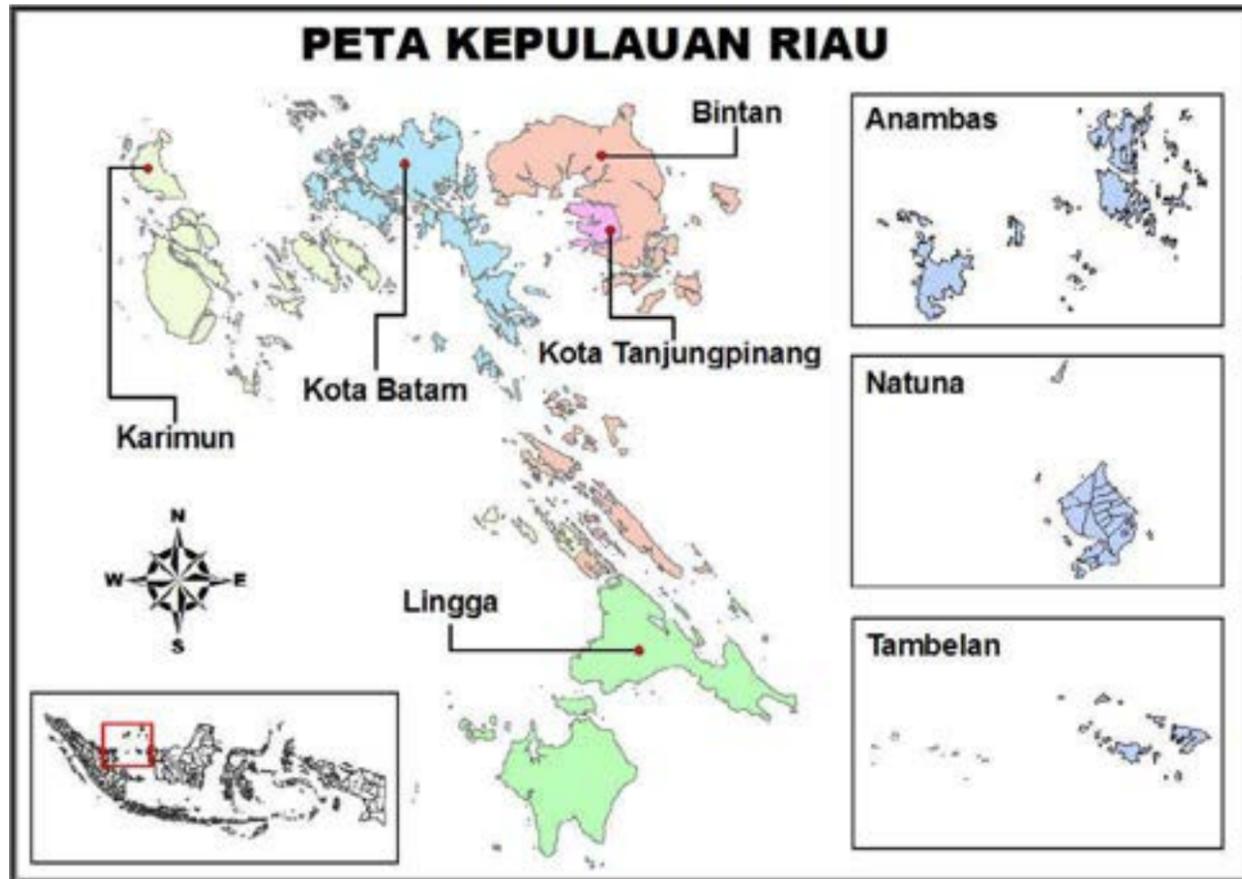
--- Peta Wilayah Sungai Kepulauan Riau ---

Wilayah Sungai Kepulauan Riau

- Posisi geografis Kepulauan Riau terletak pada 04° 15' LU dan 0° 48' LS, serta antara 130° 1' s/d 109° 10' BT
- Terdiri dari 2 Kota dan 5 Kabupaten
- 117 DAS di Provinsi Kepulauan Riau (Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015)
- Terdapat 2.048 pulau dalam WS Kepulauan Riau (Pemerintah Prov. Kepulauan Riau)
- 22 Pulau terluar NKRI (Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2017)
- Luas Wilayah 252.601 m² (Pemerintah Prov. Kepulauan Riau)
- Hujan sepanjang tahun (2.400 - 3.300 mm/th)
- Tidak ada Cekungan Air Tanah (CAT)
- Lapisan humus tipis/sulit terbentuk
- Topografi daerah umumnya terdiri dari dataran rendah pada pantai bagian timur, berbukit-bukit dan pegunungan pada bagian tengah dan barat.

Kondisi Geografis dan Isu Strategis

Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi di Indonesia yang berbatasan dengan negara Vietnam dan Kamboja disebelah utara, Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat disebelah timur, Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung disebelah selatan, Negara Malaysia, Singapura dan Provinsi Riau disebelah barat.



--- Peta Provinsi Kepulauan Riau ---

Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau

1. Kota Tanjungpinang (*Ibu Kota Provinsi*)
2. Kota Batam
3. Kabupaten Bintan
4. Kabupaten Karimun
5. Kabupaten Kepulauan Anambas
6. Kabupaten Lingga
7. Kabupaten Natuna

Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau

Defisit Air Baku	: 3.734 liter/detik
Abrasi Pantai	: 201,5 km
Pulau Terluar	: 22 Pulau
Potensi Daerah Irigasi	: 8.246 ha
DAS Kritis	: 807.471 ha
Banjir Perkotaan	: 139 titik
Free Trade Zone	: 4 Zona

Kondisi Geografis dan Isu Strategis

1. KOTA TANJUNGPINANG

Kota Tanjungpinang adalah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang terletak di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau, merupakan daerah yang strategis, karena berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia. Wilayah administrasi pemerintahan Kota Tanjungpinang dibagi menjadi 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Tanjungpinang memiliki iklim tropis dengan suhu berkisar 22 °C - 32 °C dengan kelembaban udara 85%.

Pada awalnya kota ini merupakan pusat kerajaan melayu, saat ini lebih dikenal sebagai pusat pengembangan seni budaya dan tujuan wisata. Beberapa peninggalan sejarah yang menarik bagi para wisatawan diantaranya makam raja melayu dan mesjid Sultan Riau di Pulau Penyengat. Selain itu, Tanjungpinang juga berkembang di bidang industri seperti pembuatan kapal, garmen, dan industri perikanan.

Isu Strategis

Defisit Air Baku	: 120 liter/detik
Abrasi Pantai	: 17,6 km
DAS Kritis	: 14.062 ha (70% luas daratan)
Banjir Perkotaan	: 72 titik
Free Trade Zone	: FTZ Tanjungpinang



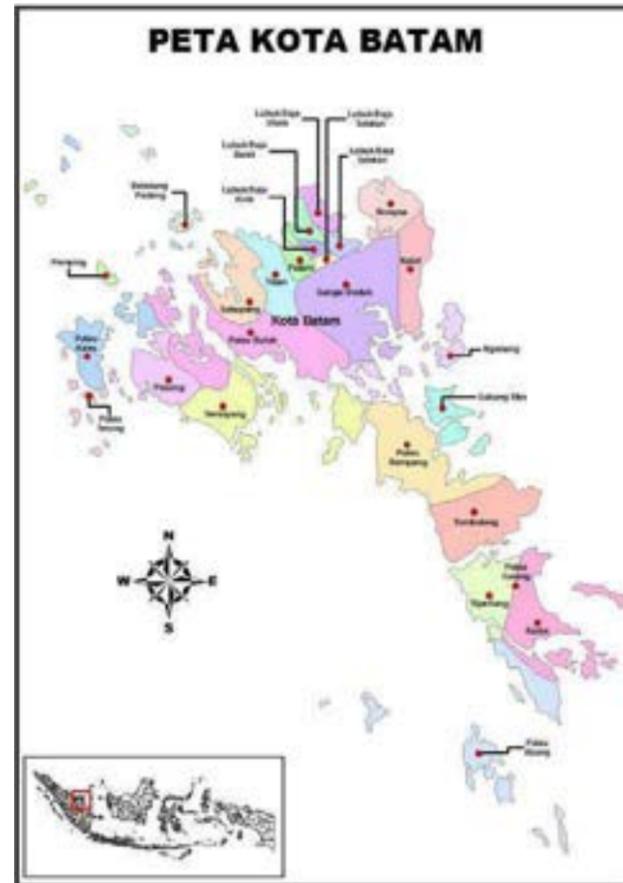
--- Peta Kota Tanjungpinang ---

Kondisi Geografis dan Isu Strategis

2. KOTA BATAM

Kota Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau dan merupakan kota dengan pop ulasi terbesar ke-tiga di Wilayah Sumatera setelah Medan dan Palembang. Metropolitan Batam terdiri dari tiga pulau, yaitu Batam, Rempang dan Galang yang dihubungkan oleh Jembatan Bareleng. Batam merupakan sebuah kota dengan letak sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an awal kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat.

Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki luas wilayah daratan seluas 1.040 km² atau sekitar 1,5 kali dari wilayah Singapura, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 2.950 km². Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat celsius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah, tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur.



--- Peta Kota Batam ---



Isu Strategis

Defisit Air Baku	: 621 liter/detik
Abrasi Pantai	: 39,3 km
Pulau Terluar	: 4 Pulau
DAS Kritis	: 131.988 ha (53% luas daratan)
Banjir Perkotaan	: 21 titik
Free Trade Zone	: FTZ Batam

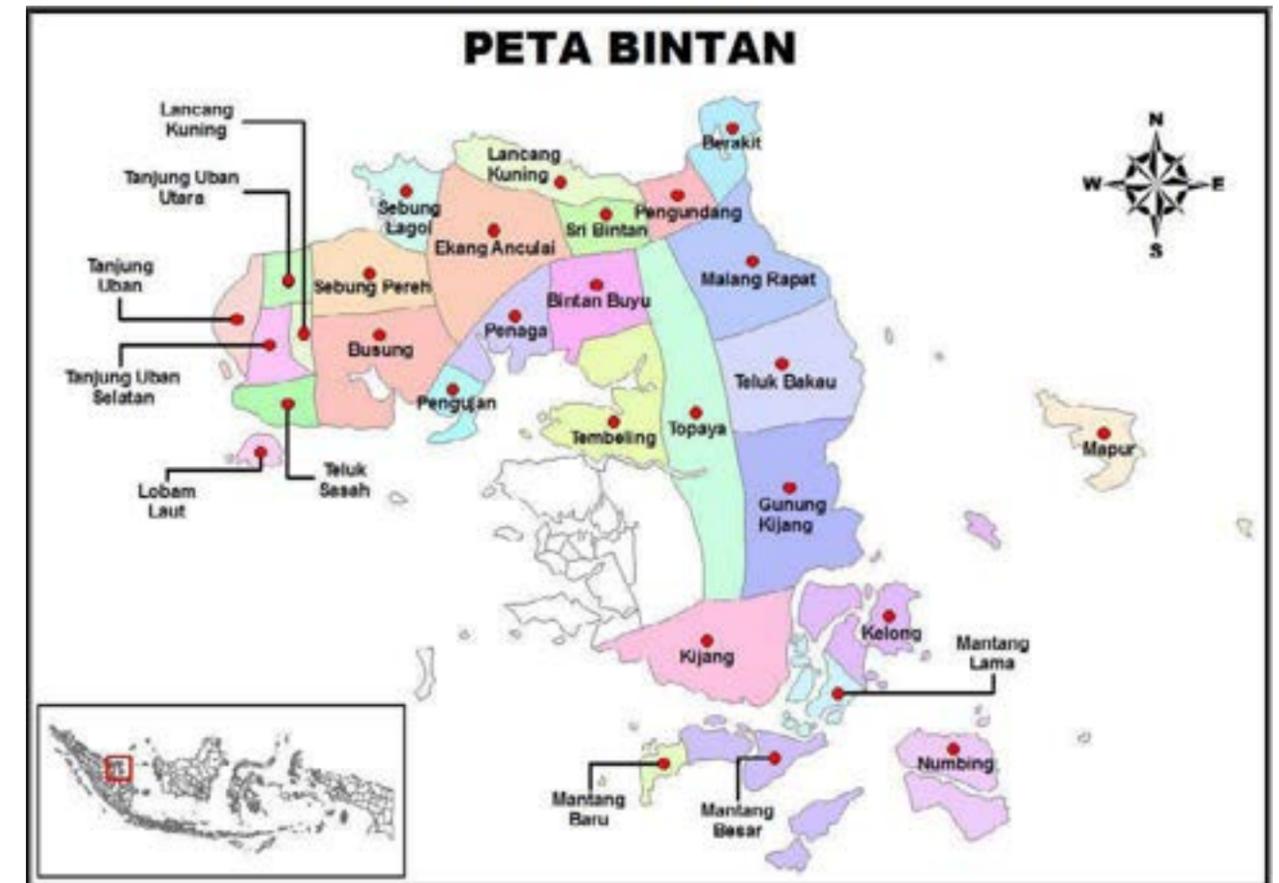
Jembatan Bareleng Kota Batam

Kondisi Geografis dan Isu Strategis

3. KABUPATEN BINTAN

Kabupaten Bintan terletak antara 00' Lintang Utara 1°20' Lintang Selatan dan 104°00' Bujur Timur 108°30' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km², namun luas daratannya hanya 2,21%, 1.946,13 Km² saja. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gunung Kijang dengan luas 344,28 Km² dan Kecamatan terkecil adalah Tambelan yaitu 90,96 Km².

Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah di antaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan.



--- Peta Kabupaten Bintan ---

Isu Strategis

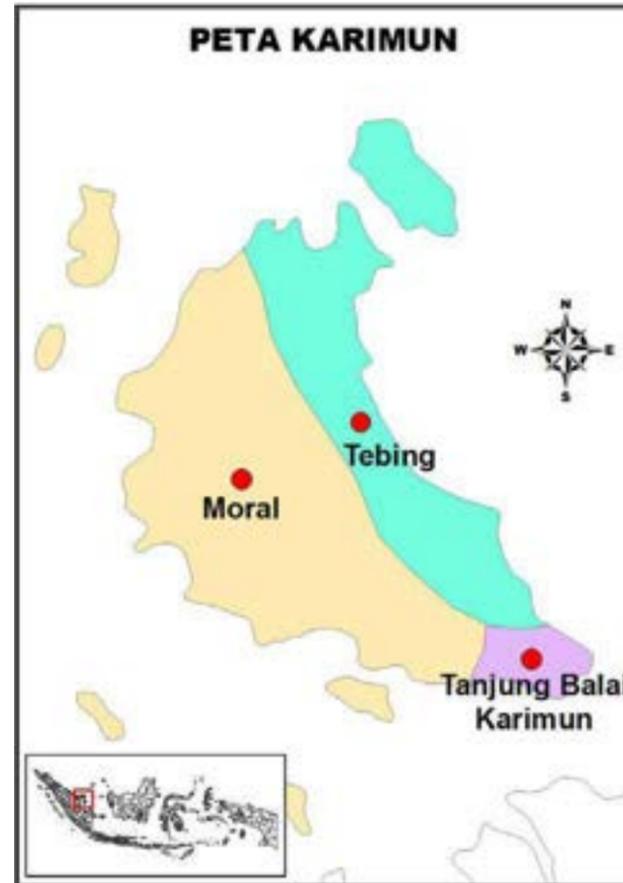
Defisit Air Baku	: 461 liter/detik
Abrasi Pantai	: 22,6 km
Pulau Terluar	: 4 Pulau
Potensi Daerah Irigasi	: 471 ha
DAS Kritis	: 100.450 ha (32% luas daratan)
Banjir Perkotaan	: 21 titik
Free Trade Zone	: FTZ Bintan

4. KABUPATEN KARIMUN

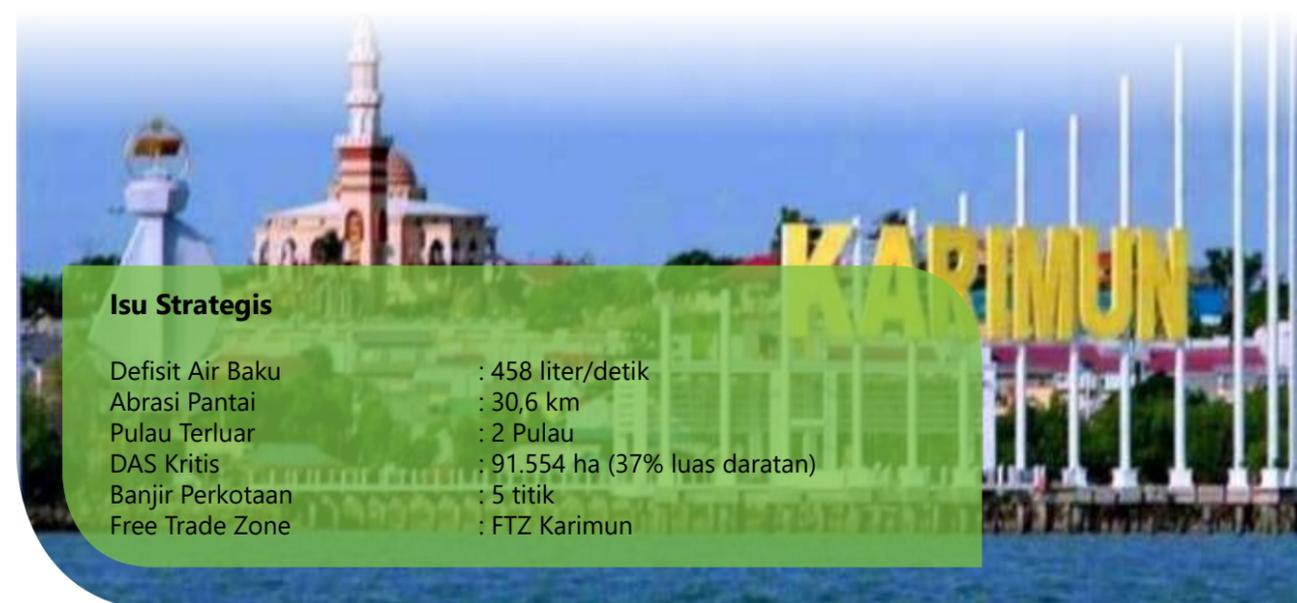
Kabupaten Karimun berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, berdekatan dengan Malaysia dan Singapura. Ibu Kota Kabupaten Karimun adalah Tanjung Balai Karimun. Kabupaten Karimun memiliki sumber daya alam seperti Bauksit, Timah, Granit dan Pasir Laut. Infrastruktur yang telah dimiliki Karimun, diantaranya pelabuhan laut, bandara, jalan raya, air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi.

Kabupaten Karimun terdiri dari 12 Kecamatan, 29 Kelurahan dan 32 Desa, serta dengan jumlah 198 pulau besar dan kecil, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Semenanjung Malaysia dan Singapura;
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Sebelah barat dengan Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan;
- Sebelah timur dengan Kota Batam.



--- Peta Kabupaten Karimun ---



Isu Strategis

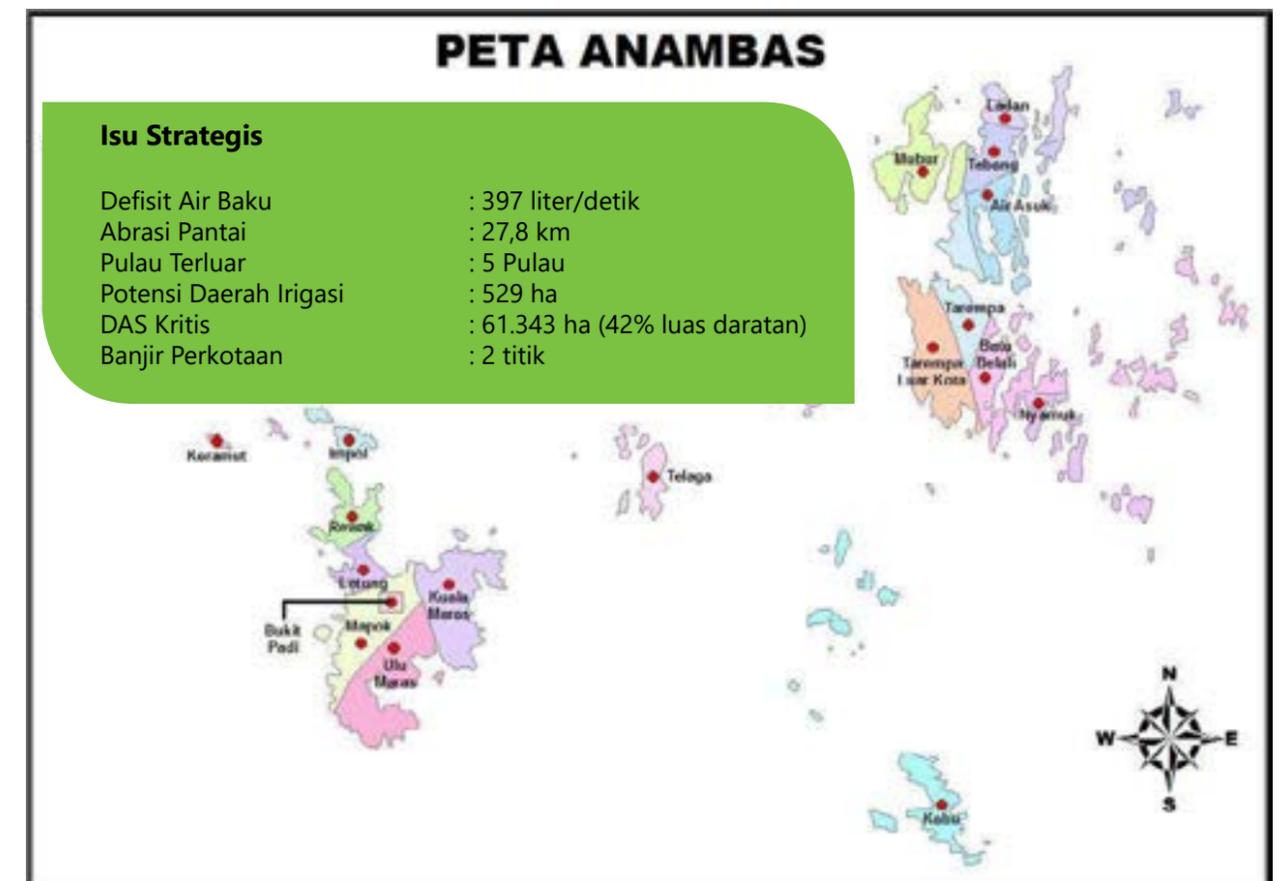
Defisit Air Baku	: 458 liter/detik
Abrasi Pantai	: 30,6 km
Pulau Terluar	: 2 Pulau
DAS Kritis	: 91.554 ha (37% luas daratan)
Banjir Perkotaan	: 5 titik
Free Trade Zone	: FTZ Karimun

Kabupaten Karimun Coastal Area

5. KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) adalah sebuah kabupaten maritim di laut China Selatan yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis KKA berada pada posisi 1 derajat 30 menit - 3 derajat 30 menit Lintang Selatan dan 105 derajat 20 menit - 106 derajat 50 menit Bujur Timur. Sedang luas wilayahnya sekitar 47.040,6 Km persegi, dengan wilayah daratnya hanya seluas 996,6 Km persegi sementara sisanya adalah lautan.

Gugusan kepulauan Anambas dibentuk sebagai sebuah daerah otonom pada tanggal 24 Juni 2008 berdasarkan UU No. 33 tahun 2008, sebagai pemekaran dari kabupaten Natuna. Wilayah KKA meliputi tujuh kecamatan yaitu kecamatan Siantan yang berpusat di Terempa, kecamatan Palmatak berpusat di Tebang, kecamatan Siantan Selatan berpusat di Air Bini, kecamatan Siantan Timur berpusat di Nyamuk, kecamatan Siantan Tengah berpusat di Air Asuk, kecamatan Lemaja berpusat di Letung, serta kecamatan Lemaja Timur berpusat di Ulu Maras. Sedang ibukota KKA berkedudukan di Terempa-pulau Siantan. Sampai dengan Januari 2010 penduduk KKA berjumlah 57.541 jiwa. Lebih dari 65 persennya berprofesi sebagai nelayan. 8 persen sebagai petani kebun, 4-5 persen sebagai pedagang, dan sisanya adalah PNS dan pekerja pada perusahaan Migas yang beroperasi di laut Anambas.



--- Peta Kabupaten Kepulauan Anambas ---

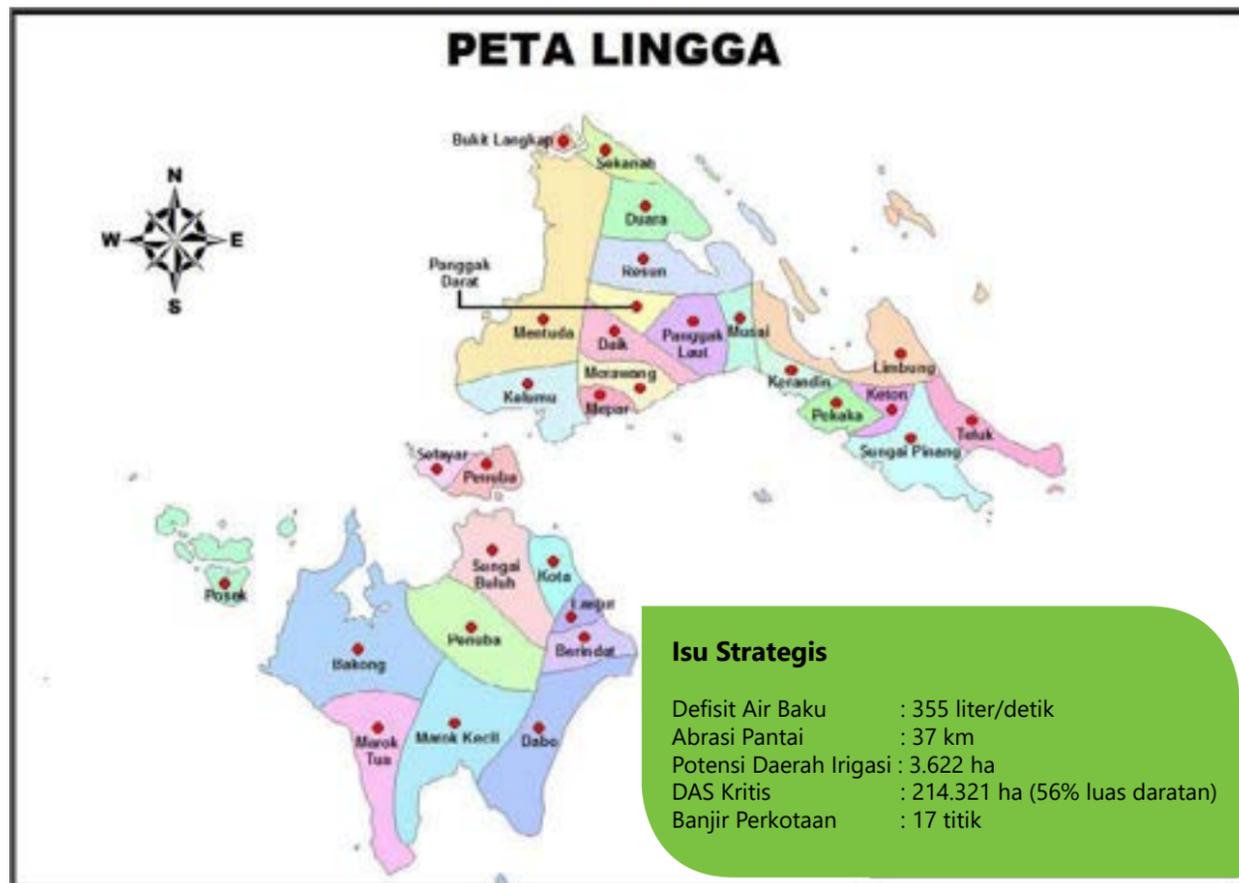
6. KABUPATEN LINGGA

Kabupaten Lingga merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau sekaligus bekas wilayah eks kawedanan Lingga yang dibentuk menjadi sebuah kabupaten sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 dengan Daik sebagai ibukotanya.

Letak Kabupaen Lingga sangat strategis karena berdekatan dengan Batam dan Bintan serta berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi dan Bangka Belitung. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam dan Laut Cina Selatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Indragiri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

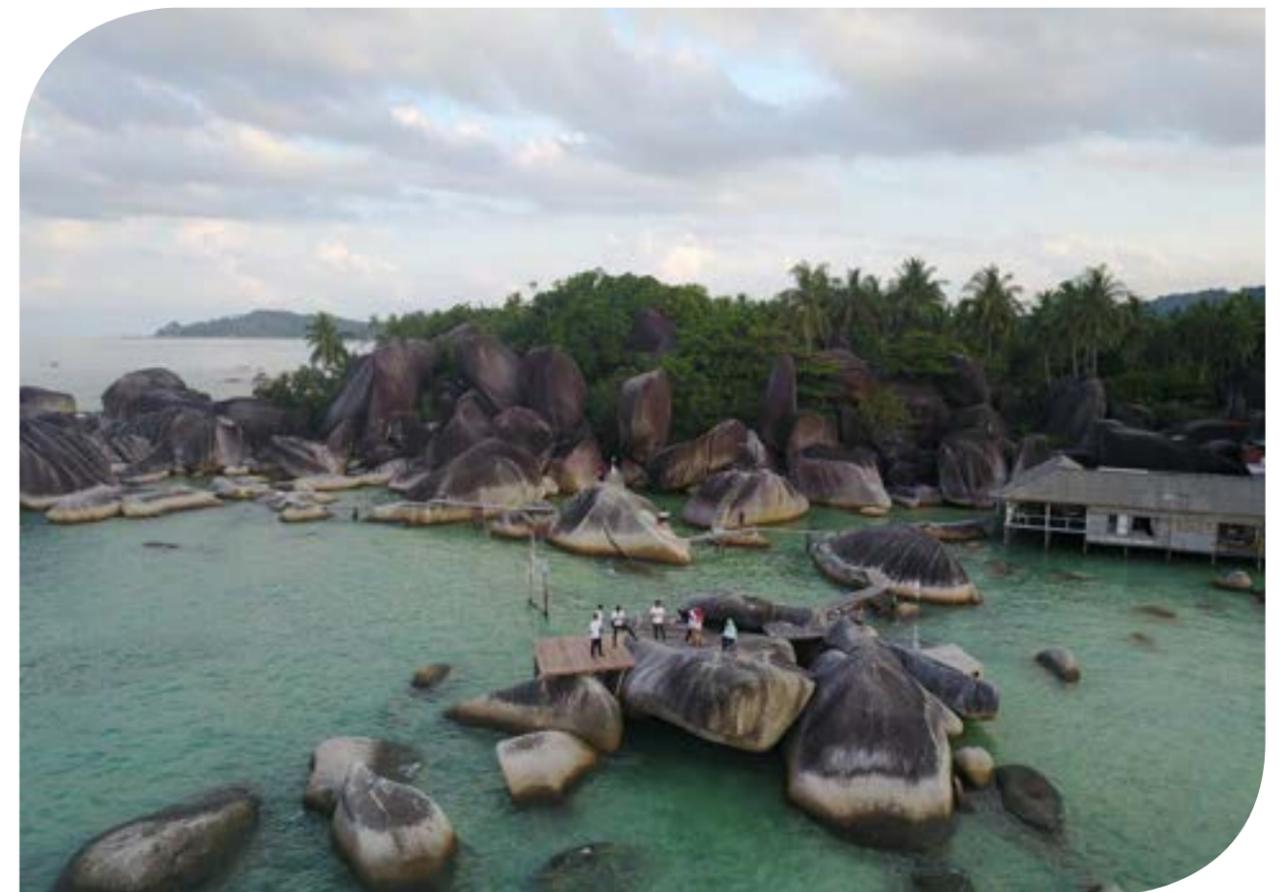
Kabupaten Lingga memiliki luas sekitar 211,772 Km² dan 90% dari luas tersebut adalah Lautan atau sekitar 654,28 Km², sedangkan luas daratannya hanya sebesar 1% atau 2.117,28 Km². Kabupaten Lingga terdiri dari 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Singkep dengan ibukota Dabo, Kecamatan Singkep Barat dengan ibukota Kuala Raya, Kecamatan Lingga dengan ibukota Daik, Kecamatan Lingga Utara dengan ibukota Duara, dan Kecamatan Senayang dengan ibukota Senayang. Jumlah Pulau yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Lingga sebanyak 377 pulau besar dan kecil dan sekitar 285 pulau diantaranya belum berpenghuni.



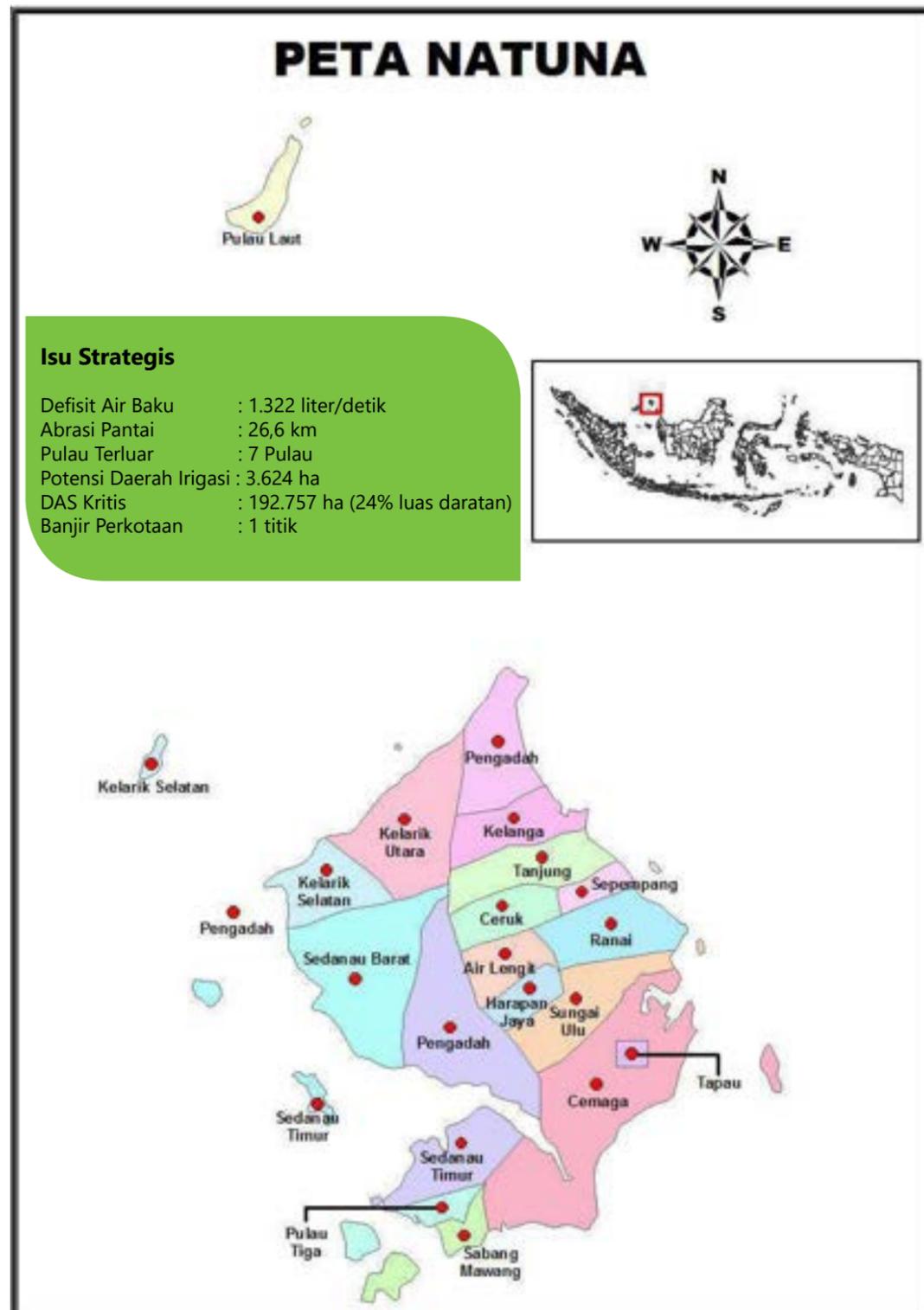
--- Peta Kabupaten Lingga ---

7. KABUPATEN NATUNA

Kabupaten Natuna, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Kabupaten Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 1.400.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680.000 barel.



Alif Stone Park, Kabupaten Natuna



--- Peta Kabupaten Natuna ---

